

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini ditandai dengan menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Kebutuhan terhadap laporan keuangan untuk membantu dalam pengambilan keputusan sosial, politik, dan ekonomi sehingga keputusan yang diambil harus memiliki kualitas yang baik dan tepat sasaran karena menjadi cermin bagi kondisi keuangan negara secara keseluruhan. Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan disclosure serta ketepatanwaktuan atas aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Kewajiban Agen (Pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan, segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (Mahmudi, 2013: 9).

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan

sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan tentang Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (KKAP, Lampiran I: paragraf 35-40) menjelaskan bahwa agar pelaporan keuangan dapat mencapai tujuannya, karakteristik kualitas laporan keuangan yang dibutuhkan, yaitu relevan, dapat diandalkan, dapat dibandingkan dan mudah dipahami. Jika informasi yang terkandung dalam laporan keuangan dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu pengguna mengevaluasi kejadian masa lalu atau saat ini, memprediksi masa depan, dan mengkonfirmasi atau mengoreksi hasil evaluasi masa lalu mereka, laporan keuangan dianggap relevan. Untuk mencapai korelasi tersebut, laporan keuangan harus disampaikan tepat waktu (*timeliness*).

Masalah Pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia merupakan suatu hal yang menarik untuk dikaji lebih dalam dan lebih lanjut, Karena pada kenyataannya didalam laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah masih banyak disajikan data-data yang tidak sesuai, selain itu masih banyak penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh badan pemeriksa keuangan (BPK) dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah. Pada tahun 2018 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyematkan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atau *disclaimer* atas laporan keuangan tahun 2017 milik Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Badan Keamanan Laut (Bakamla). Untuk laporan keuangan tahun buku 2016, KKP dan Bakamla juga mengantongi opini *disclaimer* dari BPK. Artinya, KKP dan Bakamla mengulangi lagi predikat *disclaimer* yang merupakan predikat di bawah opini Tidak Wajar (TW). Berdasar hasil Ikhtisar

Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2018, opini tersebut diberikan karena laporan keuangan KKP disajikan tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Selain itu, ada akun-akun yang tidak didukung dengan bukti yang cukup. Sekretaris Jenderal BPK Bahtiar Arif pernah menyebutkan tiga kondisi yang menyebabkan kementerian atau lembaga memperoleh opini *disclaimer*. Kondisi pertama, kementerian atau lembaga menolak diperiksa. Kondisi kedua, ada pengauditan tapi hasil pemeriksaan tak meyakinkan BPK untuk memberikan opini wajar atau tidak. Selain itu, kondisi ketiga adalah laporan keuangan yang menunjukkan ketidakwajaran.

**Tabel 1.1.**

**Rincian Opini atas LKKL dan LKBUN**

NO	Kementerian/Lembaga	Tahun	Opini BPK atas LKKL
1.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	2013	WTP-DPP
2.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	2014	WTP-DPP
3.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	2015	WTP
4.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	2016	TMP
5.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	2017	TMP

Sumber : BPK RI 2018

Permasalahan tersebut merupakan gabungan ketidaksesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Fenomena kelemahan SPI pada pelaporan keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjukkan bahwa pentingnya kebutuhan akan sumber daya manusia yang kompeten sebagai pelaksana sistem akuntansi yang penerapan di lingkungan kementerian / lembaga sangat penting karena berperan dalam menyediakan data

dan informasi yang lengkap dan benar untuk mencapai kualitas pelaporan keuangan pemerintah pusat. Untuk itu, sumber daya pengelolaan keuangan berbagai kementerian / lembaga harus memiliki latar belakang pendidikan akuntansi, pengalaman kerja di bidang keuangan, mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis keuangan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia. Sumber daya berkualitas tinggi dapat menghemat waktu dalam menyiapkan laporan keuangan. Hal ini dikarenakan sumber daya manusia tersebut sudah mengetahui dan memahami tindakan apa yang akan dilakukan dengan benar agar dapat menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu (Sembiring, 2013). Semakin cepat laporan keuangan disampaikan, semakin baik untuk pengambilan suatu keputusan. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Andini (2015), yang menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Jika kapasitas sumber daya manusia semakin tinggi, maka ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah juga semakin tinggi.

Ketepatanwaktu merupakan batasan penting untuk penyajian laporan keuangan. Akumulasi, ringkasan dan penyajian informasi akuntansi selanjutnya harus diselesaikan sesegera mungkin untuk memastikan bahwa informasi tersedia di tangan pengguna. Ketepatan waktu menunjukkan bahwa laporan keuangan harus disampaikan secara teratur untuk menunjukkan perubahan situasi perusahaan, yang dapat mempengaruhi perkiraan dan keputusan pengguna. Ketepatan waktu juga menunjukkan rentang waktu antara penyajian informasi yang dibutuhkan dan frekuensi pelaporan informasi. Informasi yang tepat waktu dipengaruhi oleh

kemampuan manajer untuk menanggapi setiap insiden atau masalah. Jika informasi tersebut tidak tepat waktu maka akan menyebabkan informasi tersebut kehilangan nilainya sehingga mempengaruhi kualitas pengambilan keputusan. Informasi yang tepat waktu juga akan mendukung manajer dalam menghadapi ketidakpastian di lingkungan kerja mereka (Winidyaningrum dkk, 2010).

Ketepatanwaktuan laporan keuangan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor pertama yang mempengaruhi ketepatanwaktuan pelaporan keuangan instansi pemerintah adalah sistem informasi akuntansi dimana laporan keuangan dihasilkan dari suatu proses yang didasarkan pada input, proses dan output yang baik. Ketiga aspek tersebut haruslah terpadu dan berkesinambungan sebagai pondasi dari sistem pelaporan keuangan yang baik (Kurniawan, 2011). Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Mahmudi (2016), menyatakan bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah disusun dalam rangka menjamin bahwa siklus akuntansi bisa berjalan dengan baik tanpa ada gangguan dan masalah, sebab apabila ada masalah dalam satu bagian saja dari siklus akuntansi tersebut bisa berakibat laporan keuangan yang dihasilkan kurang berkualitas.

Fenomena yang terjadi Berdasarkan IHPS (Ikhtisar Hasil Pemikiran Semester) I Tahun 2018 disebutkan bahwa opini disclaimer tersebut diberikan lantaran terdapat akun-akun dalam laporan keuangan yang disajikan tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan tidak didukung dengan bukti yang cukup. Dilihat dari sisi aset lancar, persediaan berupa kapal hasil pengadaan di KKP dicatat tidak sesuai dengan realisasi fisik pekerjaan dan tidak terdapat perincian harga satuan komponen kapal. Selain itu, penyajian saldo aset tetap di

KKP dan Bakamla termasuk yang tidak dapat ditelusuri atau belum jelas keberadaannya. Pencatatan aset tetap di KKP pun yang berupa tanah, jalan, jaringan dan irigasi serta Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) tidak akurat. Lebih lanjut, KKP juga dinilai bermasalah pada penyajian aset lainnya berupa aset tak berwujud, yaitu penyajian nilai paten dan hasil kajian tidak didukung dengan dokumen yang lengkap dan valid. Tak hanya itu, KKP juga bermasalah dalam penyajian kewajibannya, yaitu pencatatan utang pengadaan kapal penangkap ikan dilakukan di kapal yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dan tidak tersedia data perincian harga satuan untuk setiap komponen kapal. Dari fenomena yang terjadi diatas dapat diketahui bahwa kualitas sistem informasi akuntansi di Indonesia dapat dikatakan rendah dimana masih adanya pelaporan informasi akuntansi dalam hal ini laporan keuangan yang tidak tepat waktu, pencatatan yang dilakukan belum akurat karena bukti tidak cukup kuat, masih adanya komponen laporan keuangan yang nominalnya tidak dapat dijelaskan sehingga tidak akan mampu dipahami, serta masih adanya proses penyusunan laporan yang tidak sesuai ketentuan sehingga akan menghasilkan informasi akuntansi yang tidak relevan karena tidak akan mampu digunakan sebagai evaluasi.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja instansi pemerintah adalah pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi adalah perilaku atau sikap menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerjanya. Jika sistem informasi yang didukung oleh teknologi informasi dirancang sebagai sistem informasi yang efektif, maka dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi. penggunaan teknologi informasi merupakan suatu

kebutuhan yang harus dipenuhi, untuk membantu pengolahan data yang lebih cepat, efektif dan efisien. kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 yang direvisi Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang peran pemerintah dalam memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik, melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum, dan mencegah penyebarluasan dan penggunaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. . Hal ini sesuai dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam instansi pemerintahan.

Penelitian Ikhwan Sukri (2017) tentang pengaruh Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada SKPD yang Terdapat di Kota Padang). Variabel Independen yang digunakan adalah Pengaruh Sumber Daya Manusiadan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi. Variabel dependen adalah Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil dari penelitian tersebut adalah Sumber daya manusia tidak memiliki pengaruh terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan. Pengendalian intern berpengaruh signifikan positif terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan positif terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Semakin baik

pemanfaatan teknologi informasi maka ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan juga akan semakin meningkat

Faktor lain yang juga berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan adalah sistem pengendalian internal pemerintah. pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personil lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan yaitu efektivitas dan efisiensi operasi, kehandalan pelaporan keuangan dan ketaatan pada peraturan serta perundangan yang berlaku (Celviana, 2019). Dalam Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Internal yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Adapun tujuan SPIP pada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat akan tercapai dengan diimplementasikannya unsur-unsur dan sub unsur-sub unsur SPIP di lingkungan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat terdiri dari Lingkungan Pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, dan Pemantauan Sistem Pengendalian Intern. Dengan adanya penerapan SPIP, maka semakin kecil kemungkinan terjadinya penyimpangan, sehingga meningkatkan pencapaian kinerja pemerintah serta keseluruhan. faktanya pada tahun 2012 walaupun BPK memberikan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dengan paragraf penjelasan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan, namun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Ali Masykur Musa menuturkan telah menemukan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) di lingkungan KKP. Pertama pengelolaan hibah belum memadai, kedua pengelolaan



persediaan yang diserahkan kepada masyarakat belum memadai, selain itu dalam pemeriksaan laporan keuangan masih ditemukan ketidakpatuhan entitas terhadap perundang-undangan.

Penelitian Fortuna Zeta , Herawati ,Yunilma. (2020) tentang Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Keandalan dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Variabel Independen adalah Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengawasan Keuangan Daerah. Variabel Dependen yang digunakan adalah Keandalan dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitian tersebut adalah Kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap keandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah. pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap keandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah. pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan keandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah.

Penelitian yang dilakukan oleh Kadek Pande Astrawan, Made Arie Wahyuni, Nyoman Trisna Herawati (2016) tentang Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern Dan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Ketepatwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada SKPD Kabupaten Buleleng. Variabel independen yang digunakan adalah Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern Dan Pengawasan Keuangan

Pemerintah Daerah . Variabel Dependen yang digunakan adalah Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada SKPD Kabupaten Buleleng. Hasil penelitian menunjukkan Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh positif secara signifikan terhadap keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Dalam tinjauan Islam, Islam sangat menghargai waktu, karena waktu adalah sangat bernilai. Dalam Al-Qur'an Q.S (Al-Asr 103 : 1-3) :

وَالْعَصْرِ ۗ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۗ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا

بِالْحَقِّ ۗ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۗ

Artinya : (1) “ Demi masa ” , (2). “*Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian*”. (3) “*kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh serta saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran.* ”

Di dalam Q.S Al-Asr 103 ayat 1-3 menjelaskan bahwa Waktu menjadi sesuatu yang urgen, karena waktu adalah modal utama bagi kehidupan manusia. Allah SWT bersumpah demi waktu bahwa waktu adalah milik Allah Swt, dan waktu yang tidak digunakan untuk hal yang bermanfaat maka akan mengakibatkan kerugian bagi manusia. Manusia akan dalam kerugian apabila tidak menggunakan waktu dengan baik dan mengaturnya (Anggraini, 2020). Untuk mewujudkan pelaporan keuangan yang tepatwaktu maka diperlukan sikap disiplin. Didalam islam sikap disiplin dijelaskan didalam QS (An Nisa 4 :59) yang menjelaskan

bahwa Disiplin kerja dalam perspektif Islam adalah Ibadah yang dilakukan oleh seseorang dengan rasa tulus ikhlas, taat, mengikuti serta tunduk (Dani Nuryanto, 2014) .

Penyajian laporan keuangan, harus disadari bahwa banyak pihak yang akan mengandalkan ketepatanwaktuan dalam laporan keuangan tersebut. Salah satu tujuannya adalah sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi yang tersaji dalam laporan keuangan tersebut harus tepat waktu sehingga bermanfaat bagi para pemakai. Berdasarkan fenomena tersebut dapat dinyatakan bahwa Laporan Keuangan Pemerintahmasih belum seluruhnya memenuhi kriteria tepat waktu. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti dan mengangkat sebuah skripsi yang berjudul **Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pengendalian Internal Terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Instansi Pemerintah.**

## **1.2.Rumusan Masalah**

1. Apakah Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan instansi pemerintah?
2. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan instansi pemerintah?
3. Apakah Kapasitas Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan instansi pemerintah?
4. Apakah Pengendalian Internal berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan instansi pemerintah?

5. Apakah Sistem Informasi Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pengendalian Internal, berpengaruh secara simultan terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Instansi Pemerintah?
6. Bagaimana Pandangan Islam terhadap Sistem Informasi Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pengendalian Internal, Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Instansi Pemerintah?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan instansi pemerintah.
2. Untuk mengetahui Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan instansi pemerintah.
3. Untuk mengetahui pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan instansi pemerintah.
4. Untuk mengetahui pengaruh Pengendalian Internal terhadap ketepatanwaktuan pelaporan keuangan instansi pemerintah.
5. Untuk mengetahui apakah Sistem Informasi Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pengendalian Internal, berpengaruh secara simultan terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Instansi Pemerintah.
6. Untuk mengetahui pandangan Islam terhadap Sistem Informasi Akuntansi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kapasitas Sumber Daya Manusia,

Pengendalian Internal, Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Instansi  
Pemerintah

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan untuk menerapkan ilmu yang diperoleh serta menjadi pembanding untuk menyesuaikan teori dengan fakta di lapangan.

2. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan sebagai referensi atau acuan untuk menindaklanjuti penelitian-penelitian serupa dan menambah kajian pustaka di bidang sistem informasi akuntansi.

3. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak instansi pemerintah, yaitu sebagai masukan dan pertimbangan dalam mengembangkan dan menyempurnakan kebijakan pemerintah.